KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rapat konsultasi bahas pencekalan Ketua DPR
Tanggal : Rabu, 19 April 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Rapat Konsultasi Bahas Pencekalan Ketua DPR

JAKARTA- DPR RI berencana akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Agendanya, membahas beberapa isu khususnya soal pencekalan Ketua DPR RI, Setya Novanto ke luar negeri selama enam bulan. Hal tersebut sebagai langkah alternatif atas dibatalkannya pelayangan surat protes ke presiden oleh lembaga legislatif Senayan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya meminta diadakan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi membahas beberapa isu serta membahas keberatan terhadap nota pencekalan yang diterbitkan Imigrasi atas permintaan KPK terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto.

"Kita sedang mengatur rapat konsultasi dengan presiden. Dan dalam rapat konsultasi itu akan disampaikan dan dijelaskan, bukan cuma disampaikan, tapi juga dijelaskan secara langsung apa namanya, supaya tidak ada pertanyaan setelah itu," ujarnya kepada wartawam di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/4).

Fahri mengatakan, permintaan rapat konsultasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. Mengenai kapan akan dilakukan, Fahri mengaku, rencananya rapat konsultasi dilaksanakan setelah pemungutan suara putaran kedua pilkada DKI Jakarta berlangsung. "Mudah mudahan setelah pilkada ini situasi juga sudah tenang, kita akan segera ketemu. Gitu kira-kira. Tadi saya juga sudah ngomong sama Mensesneg juga," ucap Fahri.

Langkah di atas ditempuh lantaran Ketua DPR RI, Setya Novanto menyatakan, DPR RI tidak akan menyampaikan surat keberatan atas pencekalan dirinya oleh KPK. Ketua Umum Partai Golkar itu berjanji akan kooperatif terkait penanganan perkara dugaan korupsi e-KTP. "Nggak. Nggak, kita enggak menyampaikan. Kita sangat kooperatif, kita menghargai KPK dan tentu saya terima kasih kepada semua fraksi dan juga pimpinan yang rencana untuk mengusul surat. Tapi setelah saya sampaikan, mereka juga bisa mengerti," paparnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/4).

Dia juga mengaku, tidak pernah meminta partainya untuk mengirimkan nota keberatan kepada orang nomor satu di Indonesia. "Nggak pernah ada (kirim surat, Red)," tandasnya.

Sebelumnya, internal DPR RI mulai kisruh soal surat protes pencekalan Ketua DPR RI, Setya Novanto keluar negeri selama enam bulan kepada Presiden Joko Widodo. Terlebih, surat yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI itu hingga saat ini masih misteri. Alasannya, lembaga wakil rakyat itu masih menundanya. **(aen)**